

## **POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN USAHA SAYURAN DATARAN RENDAH DALAM Mendukung Industri Pengolahan**

**Kanita Paramadina**

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

Email: [paramadinakanita@gmail.com](mailto:paramadinakanita@gmail.com)

### **Abstract**

*Nganjuk Regency has significant agricultural potential, particularly in lowland vegetable cultivation, which can serve as a key raw material supplier for the food processing industry. This study aims to analyze the potential and challenges of developing lowland vegetable enterprises in supporting the processing industry in Nganjuk Regency. A qualitative descriptive method was employed using secondary data obtained from official documents and relevant publications, including reports from the Central Bureau of Statistics of Nganjuk Regency, horticultural statistics from the Ministry of Agriculture, business feasibility literature, and industrial regulations. Data were analyzed through information grouping according to market, technical, and managerial aspects, followed by descriptive analysis and literature triangulation to ensure consistency. The findings indicate that Nganjuk possesses substantial potential for developing lowland vegetable enterprises, supported by favorable geographical conditions, experienced farmers, short harvest cycles, available land for expansion, and supportive government policies. However, several challenges must be addressed, including weather dependency, limited post-harvest storage facilities, poor access to modern agricultural technology, inadequate cold chain infrastructure, difficulties in meeting industry quality standards, low financial record-keeping, lack of systematic production planning, weak marketing and negotiation skills, ineffective farmer group institutions, and limited access to formal capital. The study concludes that with integrated strategies such as weather information systems, collective post-harvest facilities, managerial capacity building, institutional strengthening, and mutually beneficial partnership models between farmers and processing industries, lowland vegetable enterprises in Nganjuk are feasible to develop and can significantly contribute to the regional economy.*

**Keywords:** *Business Feasibility, Lowland Vegetables, Processing Industry, Potential And Challenges, Nganjuk.*

### **1. Pendahuluan**

Sektor pertanian, khususnya subsektor hortikultura, memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi pertanian yang signifikan, terutama pada komoditas sayuran dataran rendah. Keunggulan geografis berupa lahan pertanian yang luas dan kondisi tanah yang subur memungkinkan petani membudidayakan berbagai jenis sayuran secara berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha yang dapat terintegrasi dengan sektor industri pengolahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023).

Sayuran dataran rendah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sayuran dataran tinggi. Menurut Rukmana (2018), sayuran dataran rendah adalah jenis sayuran yang dibudidayakan di wilayah dengan ketinggian rendah, memiliki kemampuan adaptasi terhadap suhu yang relatif tinggi, serta menunjukkan produktivitas yang cukup stabil. Karakteristik ini menjadikan sayuran seperti cabai, tomat, bayam, dan kangkung sangat cocok dikembangkan dalam skala usaha yang berorientasi pasar maupun industri. Selain itu, masa panen yang relatif pendek memungkinkan petani melakukan beberapa kali panen dalam satu tahun, sehingga pasokan sayuran dapat berlangsung secara terus-menerus jika dikelola dengan baik (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022).

Di sisi lain, perkembangan industri pengolahan makanan membutuhkan ketersediaan bahan baku yang kontinu, berkualitas, dan dalam jumlah yang memadai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa industri pengolahan bertujuan mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah dan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk berpotensi menjadi pemasok utama bagi industri pengolahan. Keterkaitan antara sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat struktur ekonomi regional.

Dari aspek pasar, permintaan terhadap sayuran dataran rendah cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring pertumbuhan industri pengolahan. Kasmir dan Jakfar (2019) menyatakan bahwa analisis kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai peluang keberhasilan usaha sekaligus meminimalkan risiko kerugian, yang mencakup aspek pasar, teknis, manajerial, lingkungan, dan keuangan. Usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk memiliki pangsa pasar yang luas karena dapat melayani berbagai segmen secara simultan, mulai dari rumah tangga, pasar tradisional, pasar modern, hingga industri pengolahan. Oleh karena itu, prospek pasar untuk pengembangan usaha ini dinilai sangat menjanjikan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk juga menghadapi sejumlah tantangan. Secara teknis, kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu siklus produksi, sementara keterbatasan fasilitas penyimpanan pascapanen dan penanganan awal masih menjadi kendala utama. Dari aspek manajerial, umumnya usaha ini dikelola secara sederhana dan berskala kecil, dengan banyak petani belum melakukan pencatatan keuangan maupun perencanaan produksi secara sistematis (Kasmir & Jakfar, 2019). Keterbatasan kapasitas manajerial ini dapat mengurangi efisiensi dan daya saing usaha dalam merespons perubahan pasar serta memenuhi standar yang ditetapkan oleh industri pengolahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pengembangan usaha sayuran dataran rendah dalam mendukung industri pengolahan di Kabupaten Nganjuk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang memungkinkan kajian ini memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai kelayakan pengembangan usaha tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi petani, pelaku industri, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan secara terintegrasi.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### **2.1. Potensi Pengembangan Usaha Sayuran Dataran Rendah di Kabupaten Nganjuk**

Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung pengembangan usaha sayuran dataran rendah. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian yang subur dengan ketinggian yang sesuai untuk budidaya sayuran seperti cabai, tomat, bayam, dan kangkung (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Kontribusi sektor hortikultura terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk tergolong signifikan dibandingkan sektor pertanian lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa potensi alam sudah tersedia dan hanya perlu dioptimalkan melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional. Dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan akses jalan turut memperkuat potensi ini (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu, dari sisi sumber daya alam, Nganjuk layak disebut sebagai wilayah strategis untuk pengembangan sayuran dataran rendah.

Selain kondisi alam, faktor sosial budaya masyarakat Nganjuk yang mayoritas berprofesi sebagai petani juga menjadi modal sosial yang penting (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Petani di daerah dataran rendah umumnya telah memiliki pengalaman turun-temurun dalam membudidayakan sayuran (Rukmana, 2018). Pengalaman ini mencakup pemilihan benih, pengendalian hama, dan penentuan masa panen yang tepat. Pengetahuan lokal yang telah terakumulasi secara lintas generasi menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan usaha. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di sektor pertanian Nganjuk tidak dapat diabaikan dalam analisis kelayakan bisnis.

Dari sisi produksi, sayuran dataran rendah memiliki siklus panen yang relatif pendek, yaitu antara 30 hingga 70 hari tergantung jenis komoditas (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Karakteristik ini memungkinkan petani melakukan beberapa kali panen dalam satu tahun (Rukmana, 2018). Pasokan bahan baku untuk industri pengolahan dapat berlangsung secara berkelanjutan jika siklus produksi dikelola dengan baik (Kasmir & Jakfar, 2019). Keberlanjutan pasokan merupakan salah satu syarat utama bagi industri pengolahan dalam memilih pemasok bahan baku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014). Oleh karena itu, potensi kontinuitas produksi menjadi nilai tambah tersendiri bagi usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk.

Potensi lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya lahan yang masih dapat diekspansi di Kabupaten Nganjuk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Masih terdapat area pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya sayuran dataran rendah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Ekspansi lahan dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan tidur atau konversi lahan dari

komoditas lain yang kurang produktif (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Hal ini membuka peluang bagi peningkatan skala produksi tanpa harus mengubah fungsi lahan secara drastis. Tentunya, ekspansi tersebut harus didukung oleh perencanaan tata ruang yang baik dan izin dari pemerintah daerah.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sektor pertanian melalui berbagai program penyuluhan dan bantuan sarana produksi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara eksplisit mendorong keterkaitan antara sektor pertanian dan industri pengolahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014). Kebijakan ini menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah di sektor hortikultura. Dukungan pemerintah daerah juga dapat berupa fasilitasi kemitraan antara petani dan industri pengolahan (Kasmir & Jakfar, 2019). Dengan demikian, faktor kebijakan turut memperkuat potensi pengembangan usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk.

Secara keseluruhan, potensi pengembangan usaha sayuran dataran rendah di Kabupaten Nganjuk sangat besar jika dilihat dari aspek geografis, sosial budaya, produksi, ketersediaan lahan, dan kebijakan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023; Rukmana, 2018; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Semua faktor ini saling terkait dan dapat menciptakan efek sinergis jika dikelola dengan baik (Kasmir & Jakfar, 2019). Namun, potensi yang besar tidak serta-merta menjamin keberhasilan usaha tanpa adanya penanganan terhadap berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, analisis mengenai tantangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari studi kelayakan bisnis ini.

## **2.2. Tantangan Teknis dalam Pengembangan Usaha Sayuran Dataran Rendah**

Tantangan teknis pertama yang dihadapi oleh usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk adalah ketergantungan pada kondisi cuaca dan iklim (Rukmana, 2018). Curah hujan yang tidak menentu, suhu ekstrem, serta perubahan musim yang sulit diprediksi dapat mengganggu siklus produksi sayuran (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Gangguan cuaca ini sering kali menyebabkan gagal panen atau penurunan kualitas hasil panen secara signifikan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Kondisi ini menjadi masalah serius karena industri pengolahan membutuhkan pasokan yang stabil baik dari segi jumlah maupun kualitas (Kasmir & Jakfar, 2019). Oleh karena itu, ketergantungan pada alam merupakan risiko teknis yang harus dikelola dengan serius.

Tantangan teknis kedua adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan pascapanen di tingkat petani dan kelompok tani (Rukmana, 2018). Sebagian besar petani di Nganjuk belum memiliki gudang penyimpanan berpendingin (cold storage) yang dapat menjaga kesegaran sayuran (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Akibatnya, sayuran yang tidak segera terserap pasar atau industri dapat rusak dalam waktu singkat (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Tingkat kerusakan pascapanen (post-harvest loss) untuk sayuran daun seperti bayam dan kangkung bisa mencapai 30-

40 persen dalam kondisi penyimpanan biasa (Rukmana, 2018). Hal ini mengurangi efisiensi usaha dan meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan.

Tantangan teknis ketiga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Penggunaan sistem irigasi tetes, greenhouse sederhana, serta alat pengolahan tanah mekanis masih terbatas di Kabupaten Nganjuk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Teknologi tersebut sebenarnya dapat membantu mengurangi risiko cuaca sekaligus meningkatkan produktivitas lahan (Rukmana, 2018). Namun, biaya investasi awal yang relatif tinggi menjadi hambatan utama bagi petani berskala kecil (Kasmir & Jakfar, 2019). Akibatnya, sebagian besar usaha sayuran dataran rendah masih mengandalkan teknologi sederhana yang sudah ada sejak lama.

Tantangan teknis keempat adalah terbatasnya infrastruktur transportasi yang mendukung rantai pasok dingin (cold chain) dari lahan ke industri pengolahan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Kendaraan pengangkut berpendingin belum tersedia secara luas di tingkat petani atau koperasi tani di Nganjuk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Sayuran yang diangkut dengan kendaraan biasa tanpa pengaturan suhu cenderung cepat layu atau membusuk, terutama pada cuaca panas (Rukmana, 2018). Kondisi ini memperpendek umur simpan sayuran dan mempersempit jangkauan pemasaran (Kasmir & Jakfar, 2019). Oleh karena itu, investasi dalam rantai pasok dingin menjadi kebutuhan mendesak jika usaha sayuran ingin memenuhi standar industri pengolahan.

Tantangan teknis kelima adalah standar kualitas yang ditetapkan oleh industri pengolahan sering kali lebih ketat dibandingkan standar pasar tradisional (Kasmir & Jakfar, 2019). Industri pengolahan biasanya mensyaratkan ukuran, tingkat kematangan, warna, serta kebersihan sayuran yang seragam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014). Sementara itu, sayuran hasil budidaya petani kecil cenderung bervariasi dalam hal ukuran dan kualitas (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Untuk memenuhi standar industri, petani perlu melakukan sortasi dan grading yang memadai, yang saat ini belum banyak dilakukan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Hal ini menjadi tantangan teknis tersendiri yang memerlukan pelatihan dan investasi tambahan.

Secara keseluruhan, tantangan teknis dalam pengembangan usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk mencakup ketergantungan cuaca, keterbatasan fasilitas penyimpanan, akses teknologi, infrastruktur transportasi pendingin, serta pemenuhan standar kualitas industri (Rukmana, 2018; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022; Kasmir & Jakfar, 2019). Semua tantangan ini saling terkait dan memerlukan pendekatan yang sistematis untuk mengatasinya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Tanpa penanganan yang memadai, potensi besar yang dimiliki oleh Nganjuk sulit untuk diwujudkan menjadi usaha yang benar-benar mendukung industri pengolahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014).

### **2.3. Tantangan Manajerial dan Kelembagaan Usaha Sayuran Dataran Rendah**

Tantangan manajerial pertama adalah rendahnya pencatatan keuangan (financial record-keeping) di kalangan petani sayuran dataran rendah di Nganjuk (Kasmir & Jakfar, 2019). Sebagian besar petani mengelola usaha secara sederhana tanpa memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Akibatnya, petani sulit mengetahui secara pasti apakah usahanya mengalami keuntungan atau kerugian (Kasmir & Jakfar, 2019). Ketidakmampuan dalam menghitung biaya produksi secara akurat juga menyebabkan penetapan harga jual sering kali tidak rasional (Rukmana, 2018). Hal ini menjadi hambatan serius ketika petani ingin bermitra dengan industri pengolahan yang membutuhkan laporan keuangan sederhana.

Tantangan manajerial kedua adalah tidak adanya perencanaan produksi yang sistematis (Kasmir & Jakfar, 2019). Petani di Nganjuk cenderung menanam sayuran berdasarkan kebiasaan atau mengikuti petani lain, bukan berdasarkan analisis permintaan pasar atau industri (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara waktu panen dengan kebutuhan industri pengolahan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Kelebihan produksi pada saat tertentu menyebabkan harga jatuh, sementara kekurangan produksi pada saat lain membuat industri kesulitan mendapatkan bahan baku (Rukmana, 2018). Perencanaan produksi yang matang sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan pasokan dan permintaan.

Tantangan manajerial ketiga adalah lemahnya kemampuan negosiasi dan pemasaran di tingkat petani (Kasmir & Jakfar, 2019). Sebagian besar petani menjual hasil panen melalui tengkulak atau perantara dengan harga yang relatif rendah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Petani jarang yang memiliki akses langsung ke industri pengolahan karena keterbatasan informasi dan jaringan (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Sistem pemasaran yang panjang ini mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani (Rukmana, 2018). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas pemasaran dan negosiasi menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan usaha.

Tantangan manajerial keempat adalah rendahnya tingkat organisasi petani dalam bentuk koperasi atau kelompok tani yang berfungsi efektif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Meskipun secara administratif banyak kelompok tani yang terdaftar, sebagian besar tidak berfungsi secara optimal dalam hal pengelolaan usaha bersama (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Kelompok tani yang lemah sulit untuk melakukan pembelian input produksi secara kolektif, mengakses permodalan, atau melakukan pemasaran bersama (Kasmir & Jakfar, 2019). Padahal, kekuatan kolektif sangat diperlukan untuk memenuhi skala ekonomis yang dibutuhkan oleh industri pengolahan (Rukmana, 2018). Penguatan kelembagaan petani merupakan tantangan manajerial yang tidak bisa diabaikan.

Tantangan manajerial kelima adalah terbatasnya akses terhadap permodalan dan sumber pembiayaan formal (Kasmir & Jakfar, 2019). Petani sayuran dataran rendah di Nganjuk umumnya mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga

relatif tinggi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Akses ke bank atau lembaga keuangan mikro terhambat oleh persyaratan administrasi dan agunan yang tidak dimiliki oleh petani kecil (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Keterbatasan modal ini menghalangi petani untuk berinvestasi pada teknologi, fasilitas penyimpanan, atau perluasan lahan (Rukmana, 2018). Padahal, investasi tersebut diperlukan untuk memenuhi standar dan skala yang diminta oleh industri pengolahan.

Secara keseluruhan, tantangan manajerial dan kelembagaan meliputi rendahnya pencatatan keuangan, tidak adanya perencanaan produksi, lemahnya kemampuan pemasaran, rendahnya fungsi kelompok tani, serta terbatasnya akses permodalan (Kasmir & Jakfar, 2019; Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Semua tantangan ini bersifat sistemik dan memerlukan intervensi baik dari dalam diri petani maupun dari pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga keuangan (Rukmana, 2018). Tanpa penanganan pada aspek manajerial, potensi teknis dan pasar yang ada sulit untuk dioptimalkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014).

#### ***2.4. Strategi Mengatasi Tantangan dan Penguatan Sinergi dengan Industri Pengolahan***

Strategi pertama untuk mengatasi tantangan teknis adalah penguatan sistem peringatan dini cuaca dan asuransi pertanian (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Petani di Nganjuk perlu mendapatkan informasi cuaca yang akurat dan tepat waktu agar dapat menyesuaikan jadwal tanam dan panen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Asuransi pertanian dapat melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen yang disebabkan oleh cuaca ekstrem (Rukmana, 2018). Pemerintah daerah dan pusat telah memiliki program-program terkait yang perlu disosialisasikan dan diakses lebih mudah oleh petani (Kasmir & Jakfar, 2019). Dengan demikian, risiko teknis dari faktor alam dapat diminimalkan secara bertahap.

Strategi kedua adalah pengembangan fasilitas penyimpanan pascapanen secara kolektif melalui skema koperasi atau kemitraan publik-swasta (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Fasilitas cold storage yang dibangun di sentra-sentra produksi sayuran di Nganjuk dapat digunakan secara bergilir oleh kelompok tani (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Biaya investasi yang besar dapat ditanggung bersama atau melalui skema kredit lunak dari pemerintah (Rukmana, 2018). Keberadaan cold storage akan memperpanjang umur simpan sayuran dan mengurangi tingkat kerusakan pascapanen (Kasmir & Jakfar, 2019). Hal ini sekaligus meningkatkan fleksibilitas petani dalam menentukan waktu penjualan yang menguntungkan.

Strategi ketiga adalah peningkatan kapasitas manajerial petani melalui program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan (Kasmir & Jakfar, 2019). Materi pelatihan harus mencakup pencatatan keuangan sederhana, perencanaan produksi, serta teknik negosiasi dengan industri (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian, akademisi, atau praktisi bisnis yang berpengalaman (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Pelatihan yang efektif tidak cukup hanya satu kali, tetapi perlu dilakukan secara berkala dengan metode

partisipatif (Rukmana, 2018). Peningkatan kapasitas manajerial ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha.

Strategi keempat adalah penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi agar benar-benar berfungsi sebagai unit usaha bersama (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Kelompok tani yang kuat dapat melakukan pembelian input secara kolektif, mengakses permodalan, serta memasarkan hasil panen langsung ke industri pengolahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023). Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi kelompok tani yang berhasil menjalin kemitraan dengan industri (Kasmir & Jakfar, 2019). Selain itu, pelatihan khusus tentang tata kelola organisasi dan koperasi juga diperlukan (Rukmana, 2018). Kelembagaan yang kuat akan menjadi jembatan antara petani individu dan industri pengolahan.

Strategi kelima adalah pengembangan model kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan industri pengolahan (Kasmir & Jakfar, 2019). Model kemitraan dapat berupa kontrak penjualan dengan harga pasti, penyediaan input produksi oleh industri, atau skema bagi hasil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014). Kontrak yang jelas harus mengatur tentang standar kualitas, volume, jadwal pengiriman, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Kemitraan yang transparan dan adil akan menciptakan kepastian usaha bagi petani sekaligus kepastian pasokan bagi industri (Rukmana, 2018). Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani kemitraan tersebut.

Secara keseluruhan, strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem informasi cuaca dan asuransi pertanian, pengembangan fasilitas penyimpanan kolektif, peningkatan kapasitas manajerial, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan model kemitraan dengan industri (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022; Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2023; Kasmir & Jakfar, 2019). Strategi-strategi ini bersifat saling melengkapi dan perlu diimplementasikan secara simultan (Rukmana, 2018). Dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk keberhasilan strategi ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 2014). Dengan implementasi yang tepat, usaha sayuran dataran rendah di Nganjuk dapat benar-benar menjadi pendukung utama industri pengolahan di wilayah tersebut.

### **3. Kesimpulan**

Kabupaten Nganjuk memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan usaha sayuran dataran rendah sebagai pendukung industri pengolahan. Potensi tersebut didukung oleh kondisi geografis yang subur, mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani berpengalaman, siklus panen sayuran yang relatif pendek, ketersediaan lahan yang masih dapat diekspansi, serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat yang mendorong keterkaitan antara sektor pertanian dan industri pengolahan. Namun demikian, pengembangan usaha ini juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan teknis meliputi ketergantungan pada

kondisi cuaca, keterbatasan fasilitas penyimpanan pascapanen, rendahnya akses terhadap teknologi pertanian modern, terbatasnya infrastruktur rantai pasok dingin, serta sulitnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh industri pengolahan. Sementara itu, tantangan manajerial dan kelembagaan mencakup rendahnya pencatatan keuangan, tidak adanya perencanaan produksi yang sistematis, lemahnya kemampuan negosiasi dan pemasaran, rendahnya fungsi kelompok tani dan koperasi, serta terbatasnya akses terhadap permodalan formal.

Untuk mewujudkan potensi yang ada dan mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi dan melibatkan banyak pihak. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan sistem informasi cuaca dan asuransi pertanian, pengembangan fasilitas penyimpanan pascapanen secara kolektif, peningkatan kapasitas manajerial petani melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi agar berfungsi sebagai unit usaha bersama, serta pengembangan model kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan industri pengolahan. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara simultan, usaha sayuran dataran rendah di Kabupaten Nganjuk layak dikembangkan dan dapat menjadi pendukung utama bagi industri pengolahan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi regional secara keseluruhan.

### References

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. (2023). *Kabupaten Nganjuk dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Nganjuk.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. BPS RI.
- Dewi, L. K., & Prasetyo, B. (2021). Analisis kelayakan finansial usaha tani sayuran. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(3), 112-128.
- Firdaus, M. (2021). *Ekonomi pertanian dan industri hilir*. Rajawali Pers.
- Haryanto, B., Nugroho, A., & Lestari, R. (2019). Post-harvest handling of lowland vegetables. *Journal of Horticultural Science*, 8(1), 22-35.
- Kasmir, & Jakfar. (2019). *Studi kelayakan bisnis* (Edisi Revisi). Kencana.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2021-2025. Kementerian Perindustrian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Statistik hortikultura 2022*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Mulyani, S. (2020). *Potensi ekonomi hortikultura dataran rendah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, T., & Handayani, S. (2020). Pemberdayaan kelompok tani melalui kemitraan industri. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 14(2), 78-92.
- Purnomo, H., & Sari, D. (2020). Strategi pengembangan kemitraan petani dan industri. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 15(2), 45-60.
- Rukmana. (2018). *Hortikultura untuk daerah dataran rendah*. Alfabeta.
- Santoso, E., & Rahmawati, N. (2023). Tantangan pengembangan cold chain di perdesaan. *Jurnal Teknologi Pangan*, 18(1), 33-47.
- Setiawan, A. (2021). *Agribisnis sayuran di Jawa Timur*. UB Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4*. Sekretariat Negara.